



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja secara periode triwulan sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 19 Januari 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



Lollan Panjaitan

NIP. 19710125 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 16
BAB III AKUNTABILITAS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	
A. Capaian Kinerja	III - 1
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	III - 4
C. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023	III - 6
D. Analisa Efisiensi Sumber Daya	III - 53
E. Realisasi Anggaran	III - 60
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 5

DAFTAR TABEL

I.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 10
I.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 10
II.1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2017	II - 4
II.1.2	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018 - 2019	II - 8
II.1.3	Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II - 12
II.1.4	Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019	II - 12
II.1.5	Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II - 13
II.1.6	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020 - 2024	II - 14
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024	II - 16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (awal)	II - 17
II.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi)	II - 18
III.2.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	III - 4
III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen HUBla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III - 6
III.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKK 1) Kesatu (1).....	III - 8
III.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1).....	III - 9
III.3.4	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	III - 9
III.3.5	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III - 10
III.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2).....	III - 11
III.3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)	III - 12

III.3.8	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 12
III.3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 14
III.3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 15
III.3.11	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 15
III.3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 17
III.3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 17
III.3.14	Disepakatinya Perjanjian Kerjasama di Bidang Transportasi Laut	III - 19
III.3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 23
III.3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 24
III.3.17	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 24
III.3.18	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023	III - 25
III.3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 26
III.3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 26
III.3.21	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 27
III.3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 28
III.3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 29
III.3.24	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 29
III.3.25	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan	III - 33
III.3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8).....	III - 42

III.3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)	III - 42
III.3.28	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 43
III.3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9).....	III - 45
III.3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)	III - 45
III.3.31	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 47
III.3.32	Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)	III - 48
III.3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 49
III.3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 50
III.3.35	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	III - 50
III.3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)	III - 52
III.3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)	III - 52
III.4.1	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	III - 53
III.5.1	Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023	III - 60

DAFTAR GRAFIK

III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III - 7
III.3.2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	III - 10
III.3.3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 13
III.3.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 16
III.3.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	III - 18
III.3.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 25
III.3.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 27
III.3.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 33
III.3.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 45
III.3.10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 48
III.3.11	Jumlah KSP Yang Di Laksanakan	III - 51

DAFTAR GAMBAR

- I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut... I - 4



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai langkah maju diperlukan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja, dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan atas pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disebut Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



- 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 26. Surat Keputusan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 27. Surat Keputusan Direktorat Jenderal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024.



B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 17 Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Jenderal Perhubungan Laut.

2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;



- c. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan reuvisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan



- c) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan,
- d) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

c. Bagian Sumber Daya Manusia

1) Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.



d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- a) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan



pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan

- c) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2023 yaitu 309 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	1	1
3.	S2	47	47
4.	S1	135	135
5.	D4	2	2
6.	D3	40	40
7.	D2	0	0
8.	D1	10	10
9.	SLTA	74	74
10.	SLTP	0	0
11.	SD	0	0
TOTAL		309	309

- b. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	0	0
3.	IV/c	1	1
4.	IV/b	4	4
5.	IV/a	7	7
6.	III/d	66	66
7.	III/c	49	49
8.	III/b	78	78
9.	III/a	44	44
10.	II/d	26	26
11.	II/c	18	18
12.	II/b	3	3
13.	II/a	9	9
14.	I/d	1	1
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
TOTAL		309	309



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2023

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 - 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah IKU serta sasaran yang telah ditetapkan:

1. Pada sasaran "**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Administrasi dan Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT).
 - Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
2. Pada sasaran "**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi SDM Aparatur/ Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis).
 - Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS.
 - Jumlah Pegawai yang Mutasi.
 - Jumlah Pegawai yang Pensiun.



- Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
 - Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi.
3. Pada sasaran “**manajemen pengelolaan keuangan, Asset dan PNBP**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
4. Pada sasaran “**Meningkatnya manajemen kinerja melalui dukungan administrasi dan teknis**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis
 - Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi
 - Jumlah Studi dan Kajian yang disusun.
5. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perkantoran lainnya**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung).
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran.
6. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan dan efektifitas pelaksanaan regulasi dalam penyelenggaraan Transportasi Laut**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan.
 - Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan.
 - Jumlah penyelesaian perkara.
7. Pada sasaran “**Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.



- Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral.

8. Pada sasaran **“Meningkatnya kinerja kehumasan dalam memfasilitasi peningkatan peran serta *stakeholders*”** dengan indikator kinerja utama meliputi:

- Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum.
- Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler.





Tabel II.1.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2015			2016			2017		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Sistem	3	4	133,33	6	4	66,67	1	2	200
2. Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	Pedoman/ Standar/ Protap	3	3	100	6	3	50	3	1	33.33
3. Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis)	Orang	3.870	954	24,65	3.511	3.429	97.66	4.621	4.782	103.48
4. Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS	Orang	1.876	0	0	3.250	22	0,67	3.295	0	0
5. Jumlah Pegawai yang Mutasi	Orang	720	885	122,92	720	1.151	159,86	1.072	858	80.03
6. Jumlah Pegawai yang Pensiun	Orang	82	108	131,71	522	462	88,51	549	577	105,10
7. Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan	Bimtek	2	2	100	9	6	66,7	9	9	100



Organisasi dan Hubungan Masyarakat.											
8. Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Diklat/ Bimtek	2	1	50	5	4	80	6	6	100	
9. Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87,14	63,37	72,72	90	81,07	90,08	92.50	84.59	91.45	
10. Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	46.047.331.8 83.767	130.375.273. 633.433	283,13 3	42.403.073.5 79.705	27.026.7 55.313.9 19	63,74	2,256,561,887 ,757	28,266,123 ,121,419	1,253	
11. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	620.986.332. 124	1.605.754.55 8.169 258,58	258,58	58.208.694.1 28	75.055.153 .765	128,94	63,238,567,311	123,643,452 ,627	195.52	
12. Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis	Dokumen	5	6	120	31	30	96,77	20	20	100	
13. Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi	Dokumen	15	19	126,67	76	63	82,89	27	25	92,59	
14. Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	Studi/ Kajian	2	3	150	5	4	80	4	4	100	



15. Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung)	M3	28.428	28.428	100	28.900	28.900	100	28,900	28,894	99.97
16. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
17. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
18. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
19. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
20. Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan	Peraturan	14	39	278,57	28	28	100	18	25	138.89
21. Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Peraturan	14	16	114,28	10	10	100	10	7	70
22. Jumlah penyelesaian perkara	Perkara	4	6	150	13	11	84.61	7	5	71.43
23. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Perjanjian	20	19	95	6	3	50	7	5	71.43



24. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral	Pertemuan/ Perjanjian	30	58	193,33	16	17	106,25	19	18	94.74
25. Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	15	16	106,67	6	6	100	6	5	83.33
26. Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler	Kegiatan	15	33	220	16	16	100	16	12	75

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017





Pada periode 2018 dan 2019 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari yang awalnya (pada periode 2015-2017) sebanyak 26 Indikator, menjadi 36 Indikator sehingga disajikan pada Tabel II.2. berikut :

Tabel II.1.2. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat	%	80	98,96	123,70	90	96,40	107,11
2. Prosentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Hubla	%	80	80	100	100	100	100
3. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Hubla (Skala Likert 1-5)	Nilai	4	4	100	4	4	100
4. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	82,55	86,22	104	97	0	0
5. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla	%	80	71,45	89,3	90,50	89,98	99,43
6. Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	5	100	5	5	100
7. Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	50	100	50	50	100
8. Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun	Dokumen	2	4	200	2	2	100
9. Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun	Dokumen	336	336	100	302	302	100
10. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	3	3	100	6	6	100
11. Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	10	9	90	6	6	100



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
12. Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	8	100	8	10	125
13. Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	SK	4142	7282	175,81	412	6127	147,9
14. Prosentasi Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	50	72,26	122,26	100	100	100
15. Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	20	10	50	10	9	90
16. Jumlah Peraturan Perundangan yang telah disosialisasikan	Dokumen	8	9	112	8	5	62,5
17. Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	7	140	5	2	40
18. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	7	116	6	9	150
19. Jumlah Perjanjian, Kerjasama Bilateral, regional dan Multilateral	Dokumen	2	2	100	2	0	0
20. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama	Kegiatan	18	18	100	18	14	77,78
21. Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	82,33	82,33	100	93,05	93,05
22. Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahaantangan	%	100	85,24	85,24	100	85,73	85,73
23. Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp	48.834.429.426.125	54.178.537.670.152	110,9	59.137.268.800.155	55.661.604,024.873	94,12
24. Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	4	5	125	5	5	100

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2017



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
25. Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler	Kegiatan	14	17	121	14	16	114,29
26. Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	2	100	2	3	150
27. Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkiat RB	Kegiatan	4	4	100	4	4	100
28. Jumlah Dokumen RB yang Disusun	Kegiatan	4	4	100	2	2	100
29. Jumlah SDM Sesditjen Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	27	20	74,07	133	133	100
30. Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Sesditjen Hubla	Unit	1	1	100	1	1	100
31. Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasidi Sesditjen Hubla (1-10)	Nilai	9	8	88,88	9	8	88,89
32. Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun	Dokumen	5	5	100	5	5	100
33. Persentase Penyerapan Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,12	108	91,09	94,40	103,63
34. Nilai Kinerja Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,14	108,92	91,09	103,63	113,77
35. Nilai BMN Sesditjen Hubla	Rp	4.040.035.615 .382	9.832.434.50 0	96.73	3,938.416.805 .293	2.341.781.591 .776	59,46
36. Target PNPB Sesditjen Hubla	Kegiatan	73.206.150.00 0	78.300.863.0 13	106,96	61.792.762.56 1	85.328.279.78 2	138,09

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017



Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019

1. Pada **Tabel II.1.3.** disampaikan perbandingan antara rencana kebutuhan anggaran, yang termuat di dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019, dengan alokasi anggaran yang diperoleh berdasarkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada setiap tahunnya. Perbedaan alokasi anggaran ini dapat menyebabkan beberapa target kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.
2. Pada **Tabel II.1.4** disampaikan perbandingan antara alokasi anggaran (DIPA) dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019.





Tabel II.1.3. Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Renstra	Alokasi Anggaran	%												
1.	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Hubla	4.673,399	879,429		5.791,101	337,872		6.659,766	328,659		7.658,731	14,417		8.807,541	407,139	

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019

Tabel II.1.4. Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%									
1.	Belanja Pegawai												115.128.971.000	112.218.097.687	97,47	
2.	Belanja Barang												272.138.122.000	253.508.435.202	93,15	
3.	Belanja Modal												19.872.151.000	18.617.404.600	93,69	
	TOTAL												407.139.244.000	384.343.937.489	94,40	

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019



Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 diuraikan pada Tabel 1.4

Tabel II.1.5. Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Alokasi Formasi CPNS Teknis dan Non Teknis • Pemeliharaan Kompetensi Pelaut PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pemanfaatan E-Planning Pada Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sistem informasi E-Persuratan sebagai Alat Bantu/Pedoman Untuk Pencatatan/Pemilahan Surat Masuk/Dossier, Mail Tracking, Proses Disposisi, Pembuatan/ Konsep Surat Keluar/Nota Dinas
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Integrasi Database Pembangunan • Infrastruktur Transportasi Laut Pengusulan Jenis Barang Pada Proses Pengadaan Melalui E-Katalog • Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Aplikasi Informasi Eksekutif Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Familiarisasi / Hearing Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Dengan Stakeholder
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Guna kelengkapan dokumen administratif dalam pelaksanaan tata hubungan kerja antar unit/sub unit dalam satu organisasi, akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis dan SOP pada UPT Ditjen Hubla
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang (Eselon I S/D Eselon IV)
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan / mempublikasikan kinerja Ditjen Hubla kepada masyarakat



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020

Tabel II.1.6 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.



No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 2) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun setelah DIPA Tahun 2023 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



Tabel II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	26
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	11



Tabel II.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	26
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	80
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	14
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	KSP	11



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.



4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tinjauan ucxlang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program



di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





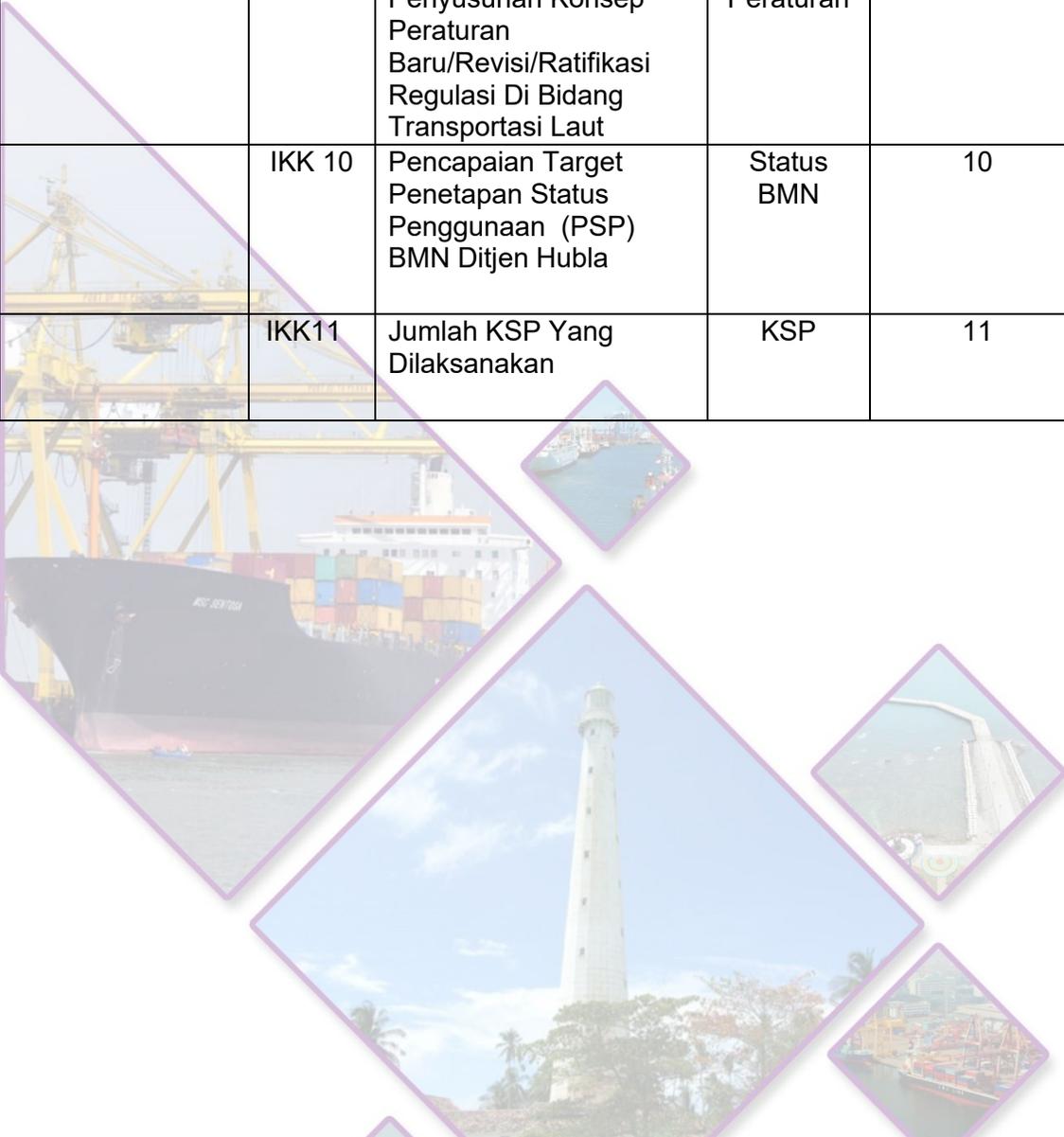
B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Tabel III.2.1 Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9 (2.469)	2,11	2,13	2,13	4,38	4,38	48,67
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	98	128	305	386	386	128,67
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	85	85	85	85	85	100
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	26	8	14	23	26	26	100
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89	0	0	80,79	80,79	80,79	90,77
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	0	3,486	3,486	3,486	116,2



		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4	15,23	37,38	58,94	97,81	97,81	100,42
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	14	3	7	11	14	14	100
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	4	6	8	8	8	100
		IKK11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	KSP	11	0	0	0	9	9	81,81





C. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

1. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1)

Tabel III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	2,11	2,13	2,13	4,38	4,38	48,67

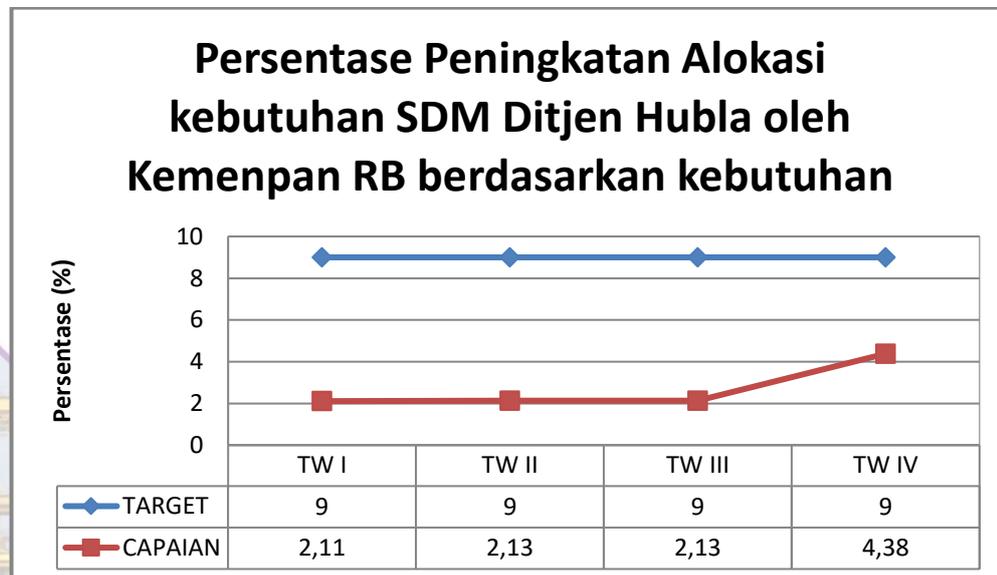
Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 23,49%, yang berasal dari lulusan pola pembibitan TA 2022 sebanyak 580 orang sedangkan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 23,69% yang berasal dari lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori tenaga Kesehatan sebesar 5 orang, sehingga prosentase pada Triwulan II sebesar 23,69%.

Triwulan III tidak terdapat realisasi, akan tetapi pada Triwulan IV disampaikan penyesuaian usulan formasi CPNS Pola Pembibitan lulusan tahun 2023 sebanyak 619 formasi jabatan dengan tingkat kelulusan 617 orang, sehingga prosentase pada Triwulan IV sebesar 48,68% dari jumlah kebutuhan pegawai tahun 2023 sebanyak 27.437 orang sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan arah kebijakan kelulusan berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Grafik III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya untuk Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut:

- a) Melakukan Verifikasi Eksisting terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- b) Mengalokasikan dari hasil jalur pola pembibitan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c) Mengalokasikan dari hasil jalur Politeknik Keuangan Negara STAN yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1) pada Tahun 2023 terdapat target yang sama dengan Tahun 2022 sebesar 9 %. Adapun pada Tahun 2023 terdapat realisasi 4,38% sehingga persentase sebesar 48,67% sehingga belum mencapai target sebesar 9% yaitu 2.469 pegawai, hal ini disebabkan oleh kebijakan kelulusan berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Tabel III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Target	9	9
				Realisasi	0	4,38
				Kinerja (%)	0	48,67

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesatu (1) "Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan" pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 4,38% sedangkan target yang di ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 9% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 48,67% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan arah kebijakan kelulusan berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	4,38	48,67

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b. Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Tabel III.3.4 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	98	128	272	386	386	128,66

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 300 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 98 sertifikat Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN), sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 32,66%. Pada Triwulan II terdapat realisasi 128 Sertifikat dengan penambahan Diklat *Training Of Trainer* (TOT 6.09) sebanyak 30 sertifikat. Pada Triwulan III terdapat Penambahan 174 sertifikat yaitu Diklat *Training Of Trainer* (TOT 6.09) sebanyak 30 sertifikat, Diklat *Training Of Examiner* (TOE 3.12) sebanyak 60 sertifikat, Diklat *Basic Safety Training* (BST) sebanyak 28 sertifikat, Diklat *Advanced Fire Fighting* (AFF) sebanyak 28 sertifikat, dan Diklat *Security Awareness Training* (SAT) sebanyak 28 sertifikat, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebanyak 386 sertifikat, yaitu penambahan 84 sertifikat dari Diklat *Basic Safety Training* (BST) sebanyak 28 sertifikat, Diklat *Advanced Fire Fighting* (AFF) sebanyak 28 sertifikat, dan Diklat *Security Awareness Training* (SAT) sebanyak 28 sertifikat. Sehingga realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 386 sertifikat atau sebesar 128,66%.

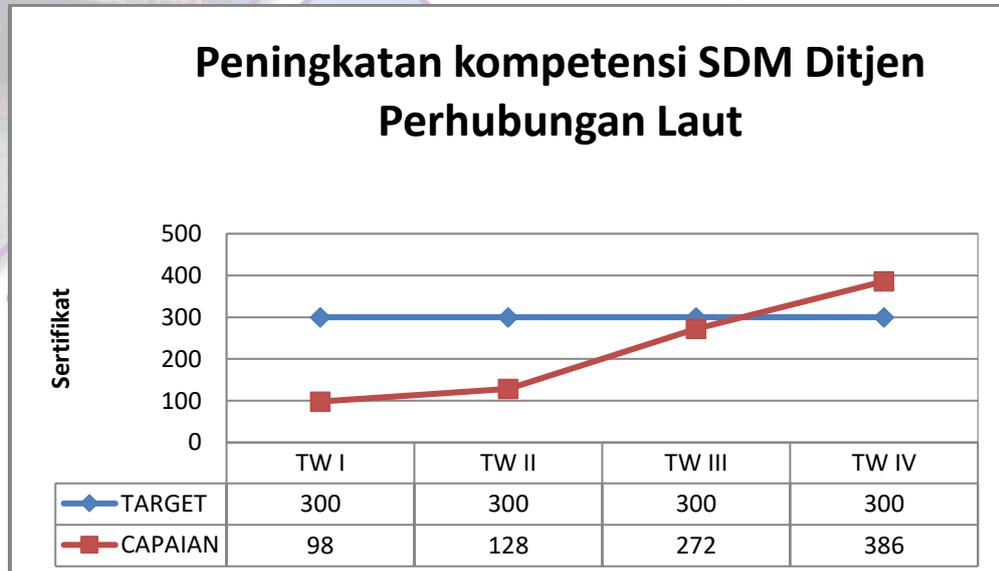


Tabel III.3.5 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	DIKLAT	PEMBUKAAN	PENUTUPAN	SERTIFIKAT
1.	Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN)	13 Maret 2023	17 Juni 2023	98
2.	Training of Trainer (TOT IMO Model Course 6.09) Angkatan I	19 Juni 2023	28 Juni 2023	30
3.	Training of Trainer (TOT IMO Model Course 6.09) Angkatan 2	27 Juli 2023	1 Agustus 2023	30
4.	Training of Examination (TOE IMO Model Course 3.12) Angkatan I	7 Agustus 2023	14 Agustus 2023	30
5.	Training of Examination (TOE IMO Model Course 3.12) Angkatan 2	9 Agustus 2023	16 Agustus 2023	30
6.	Keahlian dan Ketrampilan Pelaut Angkatan I : - <i>Basic Safety Training (BST)</i> - <i>Security Awareness Training (SAT)</i> - <i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	28 Agustus 2023	12 September 2023	84
7.	Keahlian dan Ketrampilan Pelaut Angkatan 2 : - <i>Basic Safety Training (BST)</i> - <i>Security Awareness Training (SAT)</i> - <i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	9 Oktober 2023	27 Oktober 2023	84

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Grafik III.3.2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut





2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2) pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 300 sertifikat dan terealisasi menjadi 386 sertifikat sehingga prosentase terhadap target sebesar 126,66%, sedangkan pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 300 sertifikat dan terealisasi sebanyak 300 Sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	%	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut		Target	300	300
				Realisasi	300	386
				Kinerja (%)	100	126,66

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :**

Indikator Kinerja (IKK) Kedua (2) **"Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut"** pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 386 sertifikat dan untuk target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 1900 sertifikat sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 20,31% dan belum mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 ada beberapa Diklat yang tidak masuk kedalam anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan tetapi masuk kedalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan.



Tabel III.3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1900	386	20,31

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

c. Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3)

Tabel III.3.8 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	85	85	85	85	85	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun Sesuai dengan target tahun 2023 nilai rata-rata kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 85% dengan indikator pelayanan 100% sistem bisa/dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu untuk aplikasi SEHATI, SIRANI dan Portal Hubla.



Grafik III.3.3

Grafik III.3.3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut



Dalam suatu sistem yang handal harus memenuhi 4 prinsip yaitu :

- Ketersediaan (*availability*).
- Keamanan (*security*).
- Dapat dipelihara (*maintainability*).
- Integritas (*integrity*).

Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dengan rutin melakukan pengetesan keamanan sistem, melakukan pemuktahiran teknologi, *updating* dan *patching software* dan system operasi, perawatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2023 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3) pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% karena terdapat peningkatan dimana Pengembangan Portal Hubla dan SIRANI sudah selesai dilaksanakan dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana pencapaiannya tidak melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 97,65% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi



dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara elektronik (SIRANI) sedangkan pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 83% sehingga persentasenya sebesar 97,65%.

Tabel III.3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	85	85
				Realisasi	83	85
				Kinerja (%)	97,65	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Ketiga (3) "**Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut**" pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 85% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 88% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 96,59% tidak mencapai target dikarenakan terdapat terdapat Pengembangan yang baru selesai di Bulan Desember 2023 dan terkait Kehandalan baru bisa di liat di Tahun 2024.



Tabel III.3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	88	85	96,59

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

d. Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :**

Tabel III.3.11 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

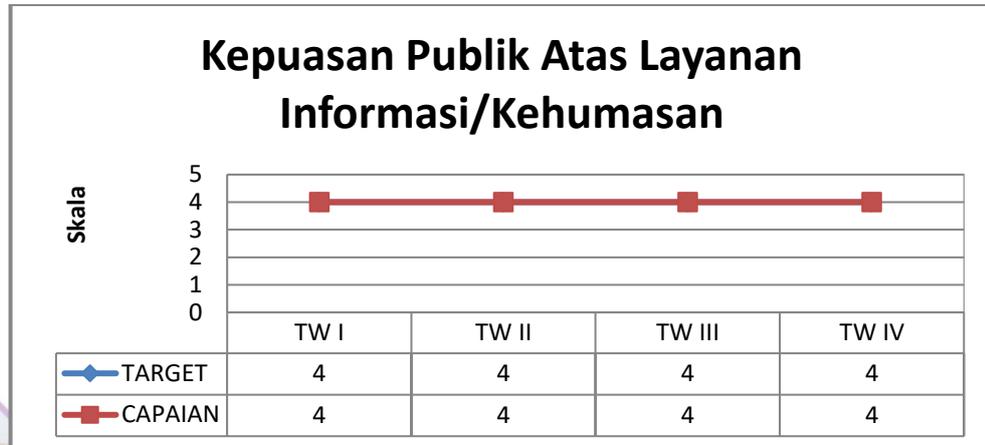
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.



Grafik III.3.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4) pada Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pencapaiannya sesuai dengan target yg telah ditetapkan indeks sebesar 4 skala dengan jumlah rata-rata responden pada masing-masing Triwulan sebesar 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dilakukan survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal hubla.dephub.go.id terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III.3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Target	4	4
				Realisasi	4	4
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Keempat (4) ”**Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan**” pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 4 Skala sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 4 Skala sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Tabel III.3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/ Kehumasan	Skala	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

e. **Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut.**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5) :**

Tabel III.3.14 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

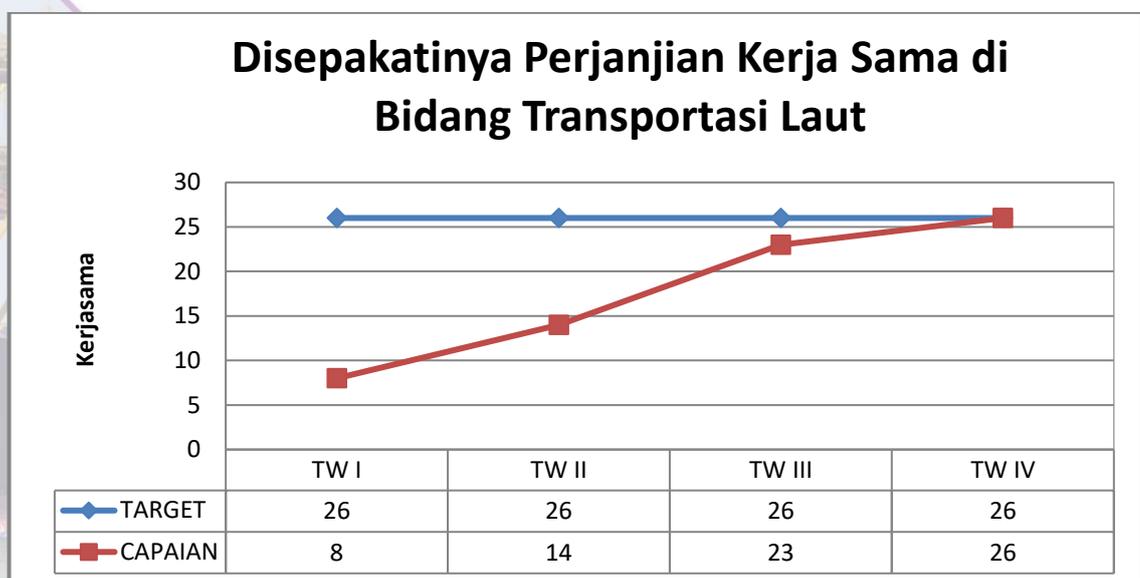
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	26	8	14	23	26	26	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebanyak 26 Perjanjian Kerja sama. Pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 8 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 30,7%. Untuk Triwulan II terdapat realisasi sebesar 14 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 38,5%. Dan untuk Triwulan III terdapat realisasi sebesar 23 Perjanjian Kerja Sama sehingga pencapaian terhadap target 88,5%. Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 26 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap sesuai dengan target 100%.

Grafik III.3.5 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut



Adapun 26 Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon tentang Gabungan Penjagaan, Pengamanan dan Patroli Pelabuhan Patimban Nomor HK.201/1/1/KSOP-PMB/2023 dan SPKS/03/II/LANAL CIREBON/2023 tanggal 24 Januari 2023;
2. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Banten Karya Sukses tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Lapangan Lainnya Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Nomor PL.301/1/1/UPP.LBN/2023 dan 002/01/bks/2023 tanggal 25 Januari 2023;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia tentang Penggunaan Perairan Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar/MuatBahan dan Material Pembangunan Fasilitas Pemboran Sumur Kenanga (KNG)-001 PT Pertamina Drilling Services Indonesia di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten



Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Nomor HK.201/1/1/OP.BLW-2023 dan 045/DSI1100/2023-SO tanggal 27 Januari 2023;

4. Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengamanan di Pelabuhan Patimban Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Nomor HK.201/1/2/KSOP-PMB/2023 dan PKT/01/II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
5. Perjanjian Sewa antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Easybook Teknologi Indonesia Tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Sebagian Barang pada Gedung Terminal Pelabuhan Sanur Nomor PL.107/1/7/KSOP.BNA-2023 dan D03.02.01/DIR/PT.ETI/II/2023 tanggal 8 Februari 2023;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Jasa Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Belawan Nomor HK.201/1/3/OP.BLW-2023 dan KS.02/15/3/1/B1/BLW-23 tanggal 15 Maret 2023;
7. Perjanjian Sewa antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, Kabupaten Banggai-Sulawesi Tengah Nomor HK.201/1/2/10/DJPL/2023 dan 01/PKS-PCNI/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;
8. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Indika Logistic & Support Services tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Indika *Logistic & Support Services* di Pelabuhan Balikpapan tanggal 27 Maret 2023.
9. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Komodo Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Penempatan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan Rambu Suar di Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PKS.1/T.17/TU/REN/4/2023 dan Nomor HK.201/1/1/DNG.KPG-2023 tanggal 18 April 2023;
10. Perjanjian Kerjasama antara Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Penyaluran Gaji dan Penghasilan lainnya Pegawai Serta Penyediaan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah Nomor HK.201/4/6/DJPL/2023 dan 03/559-PKS/DIR tanggal 7 Juni 2023;



11. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas Nomor HK.201/4/14/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/2/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
12. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo Nomor HK.202/4/13/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/1/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
13. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu Nomor HK.201/4/15/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/3/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
14. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Nomor HK.201/9/15/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/1/PGPR/RH4/REG4-23 tanggal 14 Juni 2023;
15. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia Nomor HK.201/4/20/DJPL/2023 dan B.09111/HK.503/KI-23 tanggal 11 Juli 2023;
16. Adendum II Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Di Pelabuhan Yang Diusahaan Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/4/OP.TPK-23 dan Nomor KS.03/13/9/1/PMSR/RH2-23 tanggal 13 September 2023;
17. Adendum IV Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan Nomor HK.201/1/6/OP.BLW-2023 dan Nomor KS.02/13/9/1/PGPR/KMRL/REG1-23 tanggal 13 September 2023;
18. Adendum Ketiga Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahaan Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/7/OP.BLW-2023 dan Nomor KS.02/13/9/2/PGPR/KMRL/REG1-23 tanggal 13 September 2023;
19. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar *New Port* Tahap



- 1 di Pelabuhan Makassar Nomor HK.107/02/01/OP.MKS.15 dan Nomor 12/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 13 September 2023;
20. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Surabaya Nomor HK.201/1/5/OP.TPr/2023 dan Nomor KS.02/13/9/2/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 13 September 2023;
21. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Nomor P.008/1/3/KSOP.PTK.2018 dan Nomor KS.02/12/7/1/THP/UT/PI.II-18 tanggal 13 September 2023;
22. Adendum II Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/4/OP.TPr/2023 dan Nomor KS.02/13/9/1/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 13 September 2023;
23. Adendum Kedua Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/31/03/OP.MKS-2023 dan Nomor KS.01/13/9/1/PGPR/RH4/REG4-23 tanggal 13 September 2023;
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengembangan Pelabuhan Nomor 000.2.3.2/1230.B/bka/2023 dan HK.201/7/7/DJPL/2023 tanggal 24 November 2023;
25. Perjanjian Sewa antara Distrik Navigasi Tipe B Kela I Dumai Ditjen Hubla dengan PT Alinda Nusantara tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Kapal Perambuan KN. Rukat Milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai Kepada PT Alinda Nusantara Nomor HK.201/1/20/DNG.Dmi-2023 dan 039/SPK-20/AN-DND/XI-23 tanggal 1 Desember 2023;
26. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Ditjen Hubla Kemenhub RI tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Nomor 900/2022/XII/SETDAKAB.BPKPD dan HK.201/7/10/DJPL/2023 tanggal 18 Desember 2023.



Adapun Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerja antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Pangkalan Pejagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok dan KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu tentang Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Berupa Lahan Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok;
- b) Naskah Perjanjian Hibah daerah antara KSOP Patimban dengan Pemerintah daerah Subang;
- c) Perjanjian Hibah antara KSOP Kelas IV Selat Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d) Perjanjian Hibah antara UPP Kelas II Banggai dengan Pemda Kabupaten Banggai Laut;
- e) Perjanjian Penggunaan Lahan antara KSOP Kelas II Sunda Kelapa dengan Pelindo Regional II;
- f) Nota Kesepahaman Bersama antara Dirjen Hubla dengan Jasa Raharja.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK5) Kelima (5) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5) pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 26 perjanjian sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100% Sedangkan Tahun 2022 mencapai 27 Perjanjian dan mencapai persentase sebesar 128%, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel III.3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Target	21	26
				Realisasi	27	26
				Kinerja (%)	128	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kelima (5) "Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut" pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 26 sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 26 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%.

Tabel III.3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	26	26	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

f. **Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :**

Tabel III.3.17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

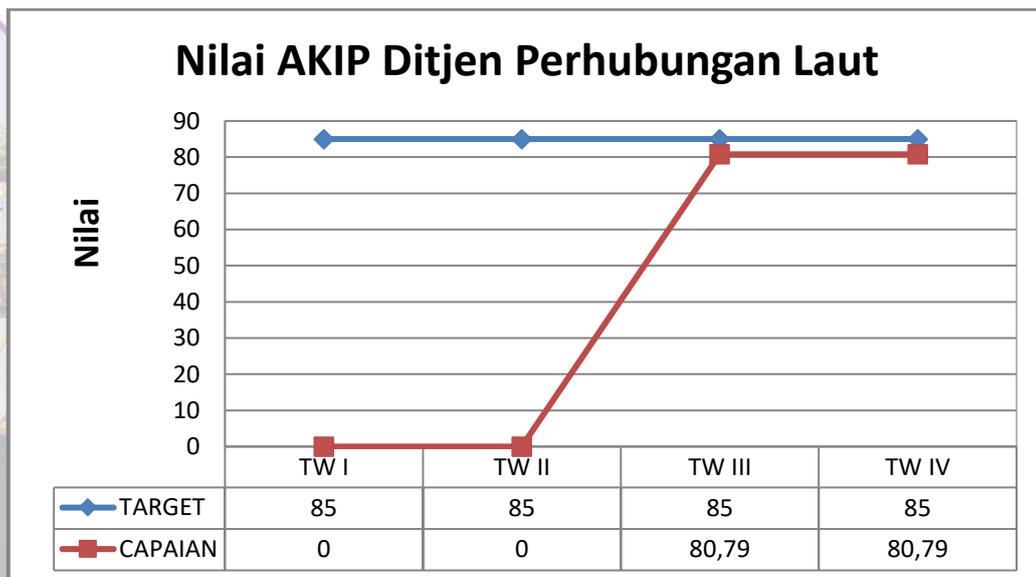
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89	0	0	80,79	80,79	80,79	90,77

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Untuk Tahun 2023 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat realisasi karena belum ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%. Sedangkan untuk Triwulan III sdh ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat dengan nilai 80,79 sehingga presentase sebesar 90,77% dari target.

Grafik III.3.6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut



Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 yang meliputi Komponen/Sub Komponen/Kriteria sebagai berikut:

Tabel III.3.18 Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24,75
2.	Pengukuran Kinerja	24,15
3.	Pelaporan Kinerja	12,38
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,50
5.	Capaian Kinerja	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,79
	Predikat	A (Sangat Baik)



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6):**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2023 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 80,79, sehingga prosentase Kinerja sebesar 90,77% sedangkan pada Tahun 2022 mendapatkan Nilai sebesar 80,42 sehingga mengalami kenaikan dari Nilai tahun sebelumnya

Tabel III.3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	85	89
				Realisasi	80,42	80,79
				Kinerja (%)	94,61	90,77

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2023 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 80,79, sehingga prosentase Kinerja sebesar 90,77%.

Tabel III.3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89	80,79	90,77

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



g. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)

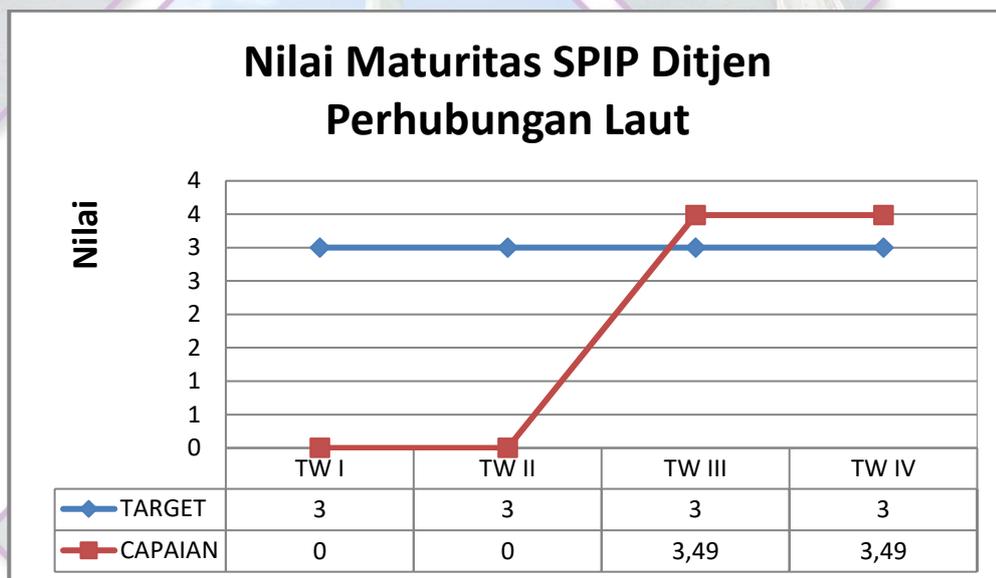
Tabel III.3.21 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.7 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	0	3,486	3,486	3,486	116,2

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk Tahun 2023 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 3,486 sehingga Persentase Kinerja pada Triwulan III sebesar 116,2 % sampai dengan Triwulan IV dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Grafik III.3.7 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut





2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7) pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 3,486 terhadap target kinerja Tahun 2023 sebesar 3, sehingga Persentase Kinerja sebesar 116,2%, sedangkan pada Tahun 2022 Terdapat Realisasi Sebesar 3,578% sehingga prosentase yang di dapat sebesar 119,26.

Tabel III.3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	3	3
				Realisasi	3,578	3,486
				Kinerja (%)	119,26	116,2

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Ketujuh (7) "Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,578 Nilai sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 3 Nilai sehingga Persentase Kinerja sebesar 116,2% dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	3,486	116,2

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

h. Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)

Tabel III.3.24 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4	15,23	37,38	58,94	97,81	97,81	100,42

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2023 sebesar 97,4% yang merupakan hasil penyesuaian dari realisasi persentase daya serap Ditjen Perhubungan Laut tahun 2022. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 17,58%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2023 yang diakses pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 17,97%. Triwulan II sebesar 41,39%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 Juni 2023 yang diakses pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 42,32%. Triwulan III sebesar 63,41%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 September 2023 yang diakses pada 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 64,83%.

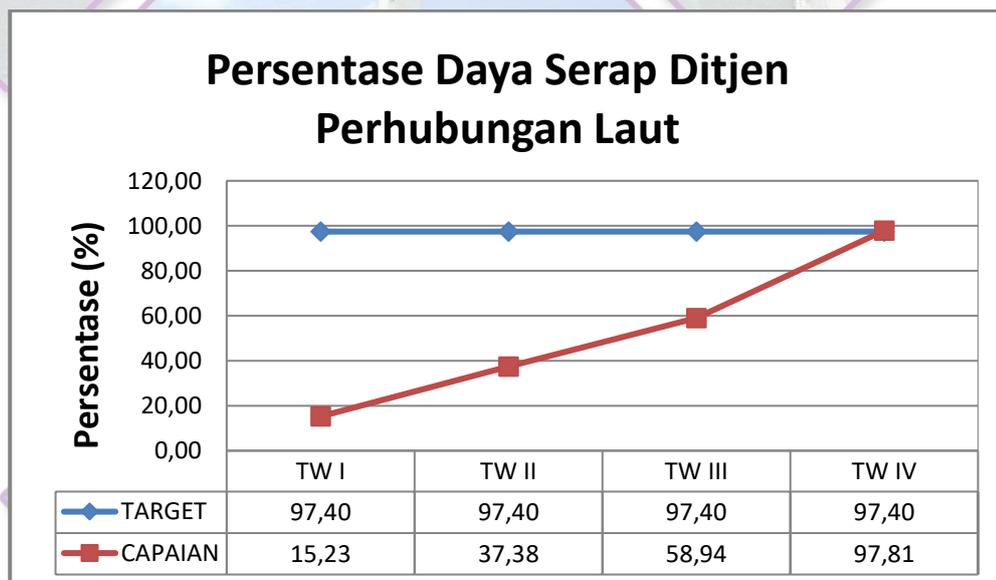


Adapun realisasi bulanan dibandingkan dengan target adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.25 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan

IKK 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut					
Satuan	Target 2022	Perbandingan Target dan Realisasi Bulanan			
		Bulan	Target	Realisasi	Kinerja
%	97,4	Januari	3,21	3,01	93,77%
		Februari	4,77	4,79	100,42%
		Maret	5,90	7,78	131,86%
		April	10,02	12,68	126,55%
		Mei	6,84	4,41	64,47%
		Juni	6,78	6,72	99,12%
		Juli	8,40	9,38	111,67%
		Agustus	5,31	5,19	97,74%
		September	6,28	7,45	118,63%
		Oktober	10,32	4,28	41,47%
		November	8,05	9,22	114,53%
		Desember	21,52	20,90	97,12%

Grafik III.3.8 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut





2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8) pada Tahun 2023 Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut posisi 31 desember 2023 (*unaudited*) yang diakses pada tanggal 16 Januari 2023)) realisasi anggaran sebesar 97,81% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 100,42% dan telah mencapai dari target yang telah ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut sehingga melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan pada Tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 97,38% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 99,12%

Tabel III.3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	98,24	97,4
				Realisasi	97,38	97,81
				Kinerja (%)	99,12	100,42

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kedelapan (8) **"Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut"** pada Tahun 2023 Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 16 Januari 2024) realisasi anggaran sebesar 97,81% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 100,42% dan telah mencapai dari target yang telah ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut.



Tabel III.3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.8 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,36	97,38	104,30

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

i. Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Tabel III.3.28 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	14	3	7	11	14	14	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target Tahun 2023 sebanyak 14 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 Rancangan Peraturan Menteri dan 2 Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 21,42% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan.

Adapun pada Triwulan I sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:



- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia;
- b) Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.205/3/9/DJPL/2019 Tentang Spesifikasi Teknis Dokumen Kesehatan Pelaut;
- c) Penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Alur Pelayanan Dan Jembatan di Perairan.

Selanjutnya pada Triwulan II sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2018;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan Dan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia (Harmonized System Of Survey And Certification / HSSC);
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penerapan Aplikasi SEHATI (System Elektronik Hubla Terintegrasi) berbasis online;
- d) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya.

Selanjutnya pada Triwulan III sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Konsep Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*service station*) oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Sertifikasi Personel *Vessel Traffic Service* (VTS);
- c) Pembahasan Konsep Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis;
- d) Pembahasan Rancangan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Biaya Perawatan Peralatan *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP)



Kemudian pada Triwulan IV sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan perubahan atas PM No. 95 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan harga jual (*charge*) jasa kepelabuhanan yang di usahakan oleh badan usaha pelabuhan.
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan pelayanan publik melalui system elektronik pelabuhan laut terintegrasi (SEHATI).

Grafik III.3.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/ Revisi/ Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9) pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 14 Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi dan terealisasi sebesar 14 dokumen capai target yang telah di ditetapkan sedangkan pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 14 Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi dan terealisasi sebesar 14 Dokumen sehingga persentase terhadap target sebesar 100%.



Tabel III.3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	Target	14	14
				Realisasi	14	14
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesembilan (9) **"Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut"** pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 14 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 17 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	%	17	14	82,53

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



j. Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10)

Tabel III.3.31 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
KK 10 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	4	6	8	8	8	80

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

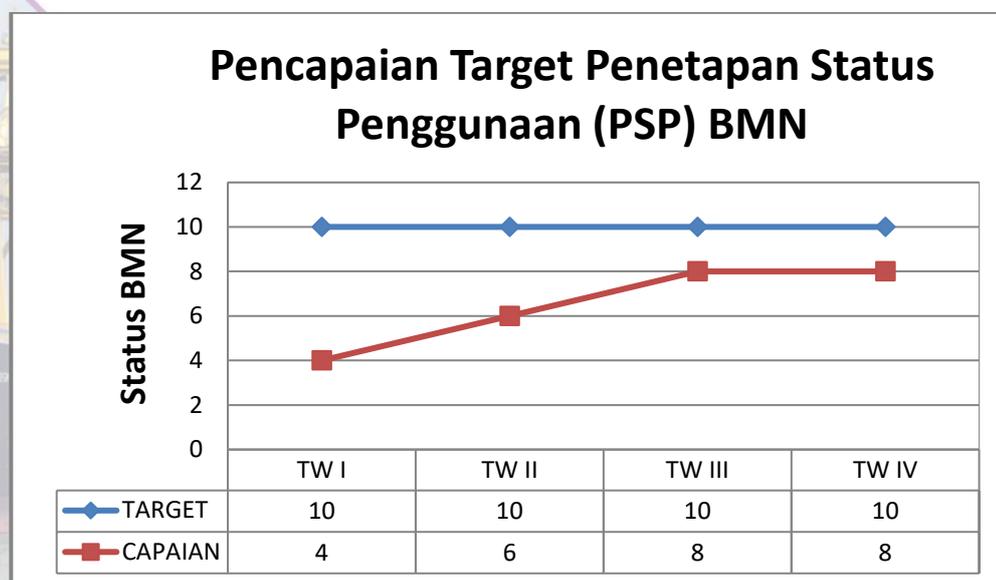
Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 10 kegiatan (lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 4 kegiatan (lokasi) yaitu PSP Disnav Sabang, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Disnav Tanjung Priok dan Disnav Tanjung Pinang, sehingga persentasi pencapaian mencapai 40%. Pada Triwulan II, terdapat dua penambahan PSP yaitu pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat dan Kantor Kesyahbandaran Utama Priok sehingga persentasi pencapaian menjadi 60% sehingga dibutuhkan 4 PSP lagi untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% hingga Triwulan IV. Adapun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan III, terdapat realisasi PSP yaitu pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tg.Perak dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Cinaku. Adapaun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Pada Triwulan IV, terdapat realisasi PSP yaitu pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Enok dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang. Adapaun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Grafik III.3.10 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN



Tabel III.3.32 Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)

No.	Lokasi	Total BMN		BMN yang sudah di PSP		Persentase	Triwulanan
		Kuantitas	Luas (m2)	Kuantitas	Luas (m2)		
1.	Disnav Sabang	11.627	132.576	11.284	121.918	89,20%	I
2.	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	3.239	0	3.238	0	99,90%	
3.	Disnav Tanjung Priok	9.228	242.027	9.220	211.462	99,62%	
4.	Disnav Tanjung Pinang	2.480	224.995	2.451	223.759	98,93%	
5.	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat	377	0	288	0	76,39%	II



6.	Kantor Kesyahbandaran Utama Priok	3084	3.746	2972	3.746	96,36%	III
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Cinaku	494	1880	374	1565	75,70%	
8.	Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak	2380	5038	2171	5038	91,21%	
9	Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang	244	12858	244	12858	100%	IV
10	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok	344	566	343	566	99,7%	

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10) Kesepuluh (10) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) adapun target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 80% sedangkan Tahun 2022 sebesar 10 jumlah PSP sehingga prosentasi sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Jumlah	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	Target	10	10
				Realisasi	10	8
				Kinerja (%)	100	80

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 10) Kesepuluh (10):

Indikator Kinerja (IKK) Kesepuluh (10) ” **Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla**” pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 8 Jumlah Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 10% sehingga persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla dan persentase pencapaiannya sebesar 80% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	8	80

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



k. Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11) Kesebelas (11) :

Tabel III.3.35 Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	KSP	11	0	0	0	9	9	81

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target KSP Tahun 2023 sebanyak 11 KSP. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena masih dalam proses, adapun rencana KSP pada tahun ini adalah KSP pada Kantor KSOP Sorong (Pelabuhan Arar) dan pada UPP Nabire (Pelabuhan Nabire) dan diharapkan pada Triwulan IV 2 (dua) KSP yang direncanakan yaitu pada Pelabuhan Arar dan Pelabuhan Nabire dapat terealisasi. Permasalahan yang terjadi adalah karena proses KSP yang panjang dan juga dibutuhkan hubungan timbal balik dengan Mitra KSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melakukan *feedback* dengan mitra terkait dan memantau proses persiapan KSP yang akan dilakukan. Sampai Triwulan IV, KSP pada Ditjen Perhubungan Laut yang direncanakan pada Kantor KSOP Sorong (Pelabuhan Arar) dan UPP Nabire (Pelabuhan Nabire) masih dalam proses.



Grafik III.3.11 Jumlah KSP Yang Dilaksanakan



Adapun upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Bagian Umum dan Perlengkapan untuk meningkatkan Jumlah Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebagai berikut :

- a) Menyamakan nilai dan luas asset antara yang diusulkan dengan yang tercatat;
- b) Melakukan sosialisasi terhadap Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I) terkait kelengkapan dokumen Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
- c) Mensinkronisasi antara Mitra Kerja dan Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11) adapun target pada Tahun 2023 sebesar 11 KSP dengan Realisasi sebesar 9 KSP, sedangkan pada Tahun 2022 Target sebesar 9 KSP dan realisasi sebesar 9 KSP sehingga prosentasi sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)

IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKK (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	Target	9	11
				Realisasi	9	9
				Kinerja (%)	100	81

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11) Kesebelas (11) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesebelas (11) "Jumlah KSP yang dilaksanakan" pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja 9 Jumlah KSP yang dilaksanakan sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 11 Jumlah Jumlah KSP yang dilaksanakan dan persentase pencapaiannya sebesar 81% sehingga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas(11)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	11	9	81

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



D. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel III.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	48,68	0	-	-	-	-
							IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	386
		Peningkatan Kompetensi TOT 6.09 (2 Angkatan)	480.000.000	480.000.000		60 peserta					
		Peningkatan Kompetensi TOE 3.12 (2 Angkatan)	450.000.000	450.000.000		60 peserta					
		Pelatihan BST (2 Angkatan)	69.160.000	69.160.000		56 peserta					
		Pelatihan AFF (2 Angkatan)	43.456.000	43.456.000		56 peserta					



							Pelatihan SAT (2 Angkatan)	19.040.000	9.520.000		56 peserta
	IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	85		Pengembangan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	1.000.000.000	0		Digabung di ruang lingkup pemeliharaan Aplikasi SEHATI
							Pengelolaan Data Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	200.000.000	0		Dialokasikan untuk redesign Website dan Android Aplikasi SPORTIF
							Pemeliharaan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal : Pagu Revisi: 5.798.213.000	5.798.212.650		-
							Pemeliharaan Aplikasi SIRANI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 244.655.000	244.388.700		-
							Penyusunan Roadmap IT Bagian Organisasi dan Humas	500.000.000	500.000.000		Dialokasikan untuk kegiatan konsinyering data dan teknologi informasi
							Pemeliharaan Portal Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 450.000.000	443.744.700		-



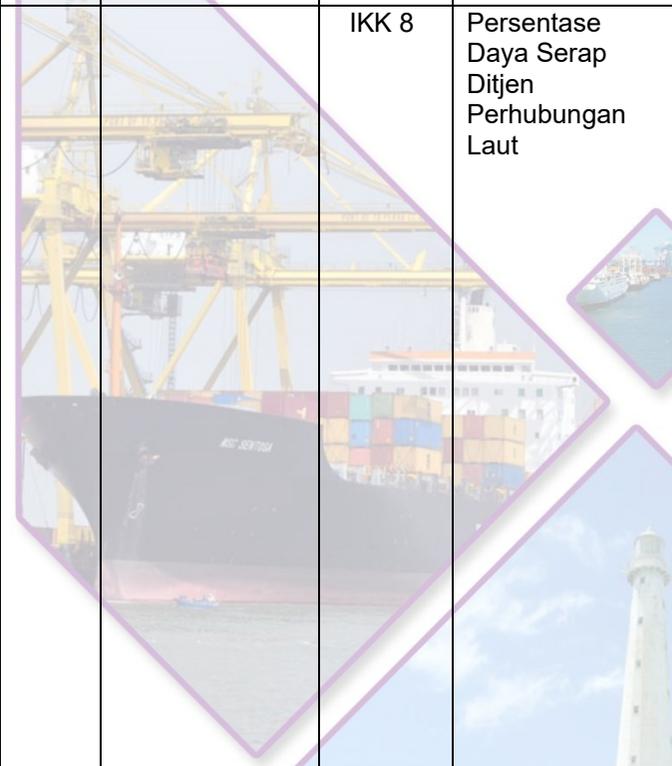
							Manage Service Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 250.000.000	239.655.600		-
							Penyusunan Informasi Statistik Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 100.000.000 Pagu Revisi: 108.800.000	106.540.000		-
							Sosialisasi dan Evaluasi Kehandalan Skala Sistem Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 250.000.000 Pagu Revisi: 711.699.000	622.042.330		-
							Workshop Pengelolaan TIK Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	250.000.000	249.240.000		-
							Monitoring dan Evaluasi Kehandalan Sistem Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 240.000.000	240.502.000		-
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	Survey Kepuasan Atas Informasi Kehumasan	0	0		-



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

							Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	200.000.000	149.314.000	0	Telah dilaksanakan monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Disnav Kelas II Tual, UPP Kelas II Tual, Pangkalan PLP Kelas II Tual pada tanggal 26 - 28 Juli 2023 Telah dilaksanakan Pembahasan Pemuktahiran dan Penetapan DIP dan DIK Tahun 2023 di Lingkungan DJPL pada tanggal 19 - 21 Oktober 2023
							Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla	Pagu Awal = 400.000.000 Pagu Akhir = 0	0	0	Anggaran direalokasikan pada kegiatan lain
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang	Kerjasama	26	26	Menyusun Naskah kesepakatan bersama dan	Pagu Awal : 445.609.600 Pagu Akhir : 581.824.000	554.915.000	-	-



		Transportasi Laut					atau Perjanjian Kerjasama				
	IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89	80,79	-	-	-	-	-	
	IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	3,486	-	-	-	-	-	
	IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4	60,51	Penyusunan Dokumen Anggaran	Pagu Awal = 1.225.728.000 Pagu Akhir = 3.349.633.000	3.006.573.700			
						Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	Pagu Awal = 791.532.000 Pagu Akhir = 841.532.000	740.534.620		-	
						Monitoring Daya Serap DIPA	Pagu Awal = 1.350.770.000 Pagu Akhir = 750.770.000	627.003.100		-	
						Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT	Pagu Awal = 829.821.000 Pagu Akhir = 2.282.264.000	2.280.697.500		-	



		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	14	14	Menetapkan Rancangan dan peraturan yang ditetapkan	3.162.574.000	2.716.322.845	0	
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Jumlah	10	8	-	-	-	-	-
		IKK11	Jumlah KSP yang Dilaksanakan	Jumlah	11	9	-	-	-	-	-





E. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2023 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.5.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Belanja Pegawai	135.510.660.000	107.684.494.000	107.334.969.890
2	Belanja Barang	244.967.930.000	236.498.794.000	235.475.628.292
3	Belanja Modal	16.389.544.000	11.504.081.000	11.411.375.528
	TOTAL PAGU	396.868.134.000	355.687.369.000	
	TOTAL REALISASI			354.221.973.710
	TOTAL SISA DANA			1.465.395.290

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 16 Januari 2024))



BAB IV

PENUTUP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2023

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 23,49%, yang berasal dari lulusan pola pembibitan TA 2022 sebanyak 580 orang sedangkan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 23,69% yang berasal dari lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori tenaga Kesehatan sebesar 5 orang, sehingga prosentase pada Triwulan II sebesar 23,69%.

Triwulan III tidak terdapat realisasi, akan tetapi pada Triwulan IV disampaikan penyesuaian usulan formasi CPNS Pola Pembibitan lulusan tahun 2023 sebanyak 619 formasi jabatan dengan tingkat kelulusan 617 orang, sehingga prosentase pada Triwulan IV sebesar 48,68% dari jumlah kebutuhan pegawai tahun 2023 sebanyak 27.437 orang sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan arah kebijakan kelulusan berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) **Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 300 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 98 sertifikat Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN), sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 32,66%. Pada Triwulan II terdapat realisasi 128 Sertifikat dengan penambahan Diklat *Training Of Trainer* (TOT 6.09) sebanyak 30 sertifikat. Pada Triwulan III terdapat Penambahan 174 sertifikat yaitu Diklat *Training Of*



Trainer (TOT 6.09) sebanyak 30 sertifikat, *Diklat Training Of Examiner* (TOE 3.12) sebanyak 60 sertifikat, *Diklat Basic Safety Training* (BST) sebanyak 28 sertifikat, *Diklat Advanced Fire Fighting* (AFF) sebanyak 28 sertifikat, dan *Diklat Security Awareness Training* (SAT) sebanyak 28 sertifikat, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebanyak 386 sertifikat, yaitu penambahan 84 sertifikat dari *Diklat Basic Safety Training* (BST) sebanyak 28 sertifikat, *Diklat Advanced Fire Fighting* (AFF) sebanyak 28 sertifikat, dan *Diklat Security Awareness Training* (SAT) sebanyak 28 sertifikat. Sehingga realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 386 sertifikat atau sebesar 128,66%

3) Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut

Adapun Sesuai dengan target tahun 2023 nilai rata-rata keandalan sistem informasi Ditjen Hubla Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 85% dengan indikator pelayanan 100% sistem bisa/dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu untuk aplikasi SEHATI, SIRANI dan Portal Hubla

4) Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informAdapun sesuai dengan target tahun 2023 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.



5) Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebanyak 26 Perjanjian Kerja sama. Pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 8 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 30,7%. Untuk Triwulan II terdapat realisasi sebesar 14 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 38.5%. Dan untuk Triwulan III terdapat realisasi sebesar 23 Perjanjian Kerja Sama sehingga pencapaian terhadap target 88.5%. Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 26 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap sesuai dengan target 100%.

Adapun 26 Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon tentang Gabungan Penjagaan, Pengamanan dan Patroli Pelabuhan Patimban Nomor HK.201/1/1/KSOP-PMB/2023 dan SPKS/03/II/LANAL CIREBON/2023 tanggal 24 Januari 2023;
2. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Banten Karya Sukses tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Lapangan Lainnya Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Nomor PL.301/1/1/UPP.LBN/2023 dan 002/01/bks/2023 tanggal 25 Januari 2023;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia tentang Penggunaan Perairan Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar/MuatBahan dan Material Pembangunan Fasilitas Pemboran Sumur Kenanga (KNG)-001 PT Pertamina Drilling Services Indonesia di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Nomor HK.201/1/1/OP.BLW-2023 dan 045/DSI1100/2023-SO tanggal 27 Januari 2023;
4. Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengamanan di Pelabuhan Patimban Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas



- Pelabuhan Kelas II Patimban Nomor HK.201/1/2/KSOP-PMB/2023 dan PKT/01/II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
5. Perjanjian Sewa antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bena Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Easybook Teknologi Indonesia Tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Sebagian Barang pada Gedung Terminal Pelabuhan Sanur Nomor PL.107/1/7/KSOP.BNA-2023 dan D03.02.01/DIR/PT.ETI/II/2023 tanggal 8 Februari 2023;
 6. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Jasa Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Belawan Nomor HK.201/1/3/OP.BLW-2023 dan KS.02/15/3/1/B1/BLW-23 tanggal 15 Maret 2023;
 7. Perjanjian Sewa antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, Kabupaten Banggai-Sulawesi Tengah Nomor HK.201/1/2/10/DJPL/2023 dan 01/PKS-PCNI/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;
 8. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Indika Logistic & Support Services tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Indika *Logistic & Support Services* di Pelabuhan Balikpapan tanggal 27 Maret 2023.
 9. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Komodo Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Penempatan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan Rambu Suar di Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PKS.1/T.17/TU/REN/4/2023 dan Nomor HK.201/1/1/DNG.KPG-2023 tanggal 18 April 2023;
 10. Perjanjian Kerjasama antara Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Penyaluran Gaji dan Penghasilan lainnya Pegawai Serta Penyediaan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah Nomor HK.201/4/6/DJPL/2023 dan 03/559-PKS/DIR tanggal 7 Juni 2023;



11. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas Nomor HK.201/4/14/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/2/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
12. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo Nomor HK.202/4/13/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/1/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
13. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu Nomor HK.201/4/15/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/3/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 14 Juni 2023;
14. Adendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Nomor HK.201/9/15/DJPL/2023 dan Nomor KS.02/14/6/1/PGPR/RH4/REG4-23 tanggal 14 Juni 2023;
15. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia Nomor HK.201/4/20/DJPL/2023 dan B.09111/HK.503/KI-23 tanggal 11 Juli 2023;
16. Adendum II Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/4/OP.TPK-23 dan Nomor KS.03/13/9/1/PMSR/RH2-23 tanggal 13 September 2023;
17. Adendum IV Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan Nomor HK.201/1/6/OP.BLW-2023 dan Nomor KS.02/13/9/1/PGPR/KMRL/REG1-23 tanggal 13 September 2023;



18. Adendum Ketiga Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/7/OP.BLW-2023 dan Nomor KS.02/13/9/2/PGPR/KMRL/REG1-23 tanggal 13 September 2023;
19. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar *New Port* Tahap 1 di Pelabuhan Makassar Nomor HK.107/02/01/OP.MKS.15 dan Nomor 12/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 13 September 2023;
20. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan RI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Surabaya Nomor HK.201/1/5/OP.TPr/2023 dan Nomor KS.02/13/9/2/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 13 September 2023;
21. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Nomor P.008/1/3/KSOP.PTK.2018 dan Nomor KS.02/12/7/1/THP/UT/PI.II-18 tanggal 13 September 2023;
22. Adendum II Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/1/4/OP.TPr/2023 dan Nomor KS.02/13/9/1/HKHM/RH3/REG3-23 tanggal 13 September 2023;
23. Adendum Kedua Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.201/31/03/OP.MKS-2023 dan Nomor KS.01/13/9/1/PGPR/RH4/REG4-23 tanggal 13 September 2023;
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengembangan Pelabuhan Nomor 000.2.3.2/1230.B/bka/2023 dan HK.201/7/7/DJPL/2023 tanggal 24 November 2023;



25. Perjanjian Sewa antara Distrik Navigasi Tipe B Kela I Dumai Ditjen Hubla dengan PT Alinda Nusantara tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Kapal Perambuan KN. Rupa Milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai Kepada PT Alinda Nusantara Nomor HK.201/1/20/DNG.Dmi-2023 dan 039/SPK-20/AN-DND/XI-23 tanggal 1 Desember 2023;
26. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Ditjen Hubla Kemenhub RI tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Nomor 900/2022/XII/SETDAKAB.BPKPD dan HK.201/7/10/DJPL/2023 tanggal 18 Desember 2023.

Adapun Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerja antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Pangkalan Pejagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok dan KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu tentang Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Berupa Lahan Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok;
- b) Naskah Perjanjian Hibah daerah antara KSOP Patimban dengan Pemerintah daerah Subang;
- c) Perjanjian Hibah antara KSOP Kelas IV Selat Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d) Perjanjian Hibah antara UPP Kelas II Banggai dengan Pemda Kabupaten Banggai Laut;
- e) Perjanjian Penggunaan Lahan antara KSOP Kelas II Sunda Kelapa dengan Pelindo Regional II;
- f) Nota Kesepahaman Bersama antara Dirjen Hubla dengan Jasa Raharja

6) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

Untuk Tahun 2023 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat realisasi karena belum ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%. Sedangkan untuk Triwulan III sdh ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat dengan nilai 80,79 sehingga presentase sebesar 90,77% dari target.



7) Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut

Untuk Tahun 2023 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%. Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 3,486 sehingga Persentase Kinerja pada Triwulan III sebesar 116,2 % sampai dengan Triwulan IV dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

8) Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2023 sebesar 97,4% yang merupakan hasil penyesuaian dari realisasi persentase daya serap Ditjen Perhubungan Laut tahun 2022. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 17,58%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2023 yang diakses pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 17,97%. Triwulan II sebesar 41,39%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 Juni 2023 yang diakses pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 42,32%. Triwulan III sebesar 63,41%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 September 2023 yang diakses pada 12 Januari 2024, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 64,83%.

9) Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

Adapun sesuai dengan target Tahun 2023 sebanyak 14 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 Rancangan Peraturan Menteri dan 2 Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 21,42% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan.

Adapun pada Triwulan I sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:



- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia;
- b) Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.205/3/9/DJPL/2019 Tentang Spesifikasi Teknis Dokumen Kesehatan Pelaut;
- c) Penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Alur Pelayanan Dan Jembatan di Perairan.

Selanjutnya pada Triwulan II sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2018;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan Dan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia (Harmonized System Of Survey And Certification / HSSC);
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penerapan Aplikasi SEHATI (System Elektronik Hubla Terintegrasi) berbasis online;
- d) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya.

Selanjutnya pada Triwulan III sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Konsep Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*service station*) oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Sertifikasi Personel *Vessel Traffic Service* (VTS);
- c) Pembahasan Konsep Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis;
- d) Pembahasan Rancangan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Biaya Perawatan Peralatan *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SRPOP)



Kemudian pada Triwulan IV sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan perubahan atas PM No. 95 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan harga jual (*charge*) jasa kepelabuhanan yang di usahakan oleh badan usaha pelabuhan.
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan pelayanan publik melalui system elektronik pelabuhan laut terintegrasi (SEHATI)

10) Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 10 kegiatan (lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 4 kegiatan (lokasi) yaitu PSP Disnav Sabang, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Disnav Tanjung Priok dan Disnav Tanjung Pinang, sehingga persentasi pencapaian mencapai 40%. Pada Triwulan II, terdapat dua penambahan PSP yaitu pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat dan Kantor Kesyahbandaran Utama Priok sehingga persentasi pencapaian menjadi 60% sehingga dibutuhkan 4 PSP lagi untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% hingga Triwulan IV. Adapun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan III, terdapat realisasi PSP yaitu pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tg.Perak dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Cinaku. Adapaun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan IV, terdapat realisasi PSP yaitu pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Enok dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang. Adapaun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam)



bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

11) Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

Adapun sesuai dengan target KSP Tahun 2023 sebanyak 11 KSP. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena masih dalam proses, adapun rencanan KSP pada tahun ini adalah KSP pada Kantor KSOP Sorong (Pelabuhan Arar) dan pada UPP Nabire (Pelabuhan Nabire) dan diharapkan pada Triwulan IV 2 (dua) KSP yang direncanakan yaitu pada Pelabuhan Arar dan Pelabuhan Nabire dapat terealisasi. Permasalahan yang terjadi adalah karena proses KSP yang panjang dan juga dibutuhkan hubungan timbal balik dengan Mitra KSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melakukan *feedback* dengan mitra terkait dan memantau proses persiapan KSP yang akan dilakukan. Sampai Triwulan IV, KSP pada Ditjen Perhubungan Laut yang direncanakan pada Kantor KSOP Sorong (Pelabuhan Arar) dan UPP Nabire (Pelabuhan Nabire) masih dalam proses

IV.2 Langkah ke depan

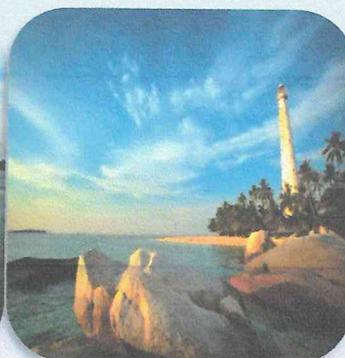
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari dukungan jajaran seluruh unit kerja yang ada serta diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

**Pt. SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

PIHAK PERTAMA
Pit. SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	26
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	89
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	11

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 26.399.080.000,-
Rp. 231.874.769.000,-
Rp. 24.371.483.000,-
Rp. 6.401.368.000,-
Rp. 68.977.294.000,-

Disetujui

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARIF TOHA

Jakarta,

2023

**Pt. SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



REVIU PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2023**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	26
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	80
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,4
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	11

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp. 26.399.080.000,00-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp. 231.874.769.000,00-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp. 24.371.483.000,00-
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp. 6.401.368.000,00-
5. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp. 68.977.294.000,00-

Anggaran

Disetujui

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2023

SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001